



Pemerintah Daerah
Kabupaten Poso



Rencana Kerja (RENJA)

**Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Poso**

Tahun 2023



@bapendaposo



@bapendaposo

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Poso Tahun 2023 dapat diselesaikan tepat waktu.

Rencana kerja tahun 2023 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Poso merupakan bagian dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Pemerintah Kabupaten Poso dan merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026.

Dengan tersusunnya Rencana Kerja yang memuat kebijakan dalam program dan kegiatan diharapkan dapat menjadi dasar dalam mengukur kinerja serta alat untuk mendorong terwujudnya good governance terhadap pelaksanaan tugas pokok, kewenangan dan pengelolaan sumber daya atas pelaksanaan kebijakan serta program dan kegiatan.

Demikian rencana kerja ini disusun dengan harapan bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam pembangunan.

Poso, 02 Januari 2023

**KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN POSO**



MAPPATUNRU USMAN, ST
NIP. 19700825 200003 1 009

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan	6
1.4 Sistematika Penulisan.....	6
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN 2022	6
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2022 dan Capaian Renstra OPD	8
2.1.1 Evaluasi Renja 2022	8
2.1.2 Capaian Renstra 2022	15
2.1.3 Analisis Kinerja Pelayanan OPD	16
2.1.4 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD	17
2.2 Review Terhadap Rancangan Awal OPD	17
2.2.1 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	21
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	22
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	22
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja OPD.....	24
3.2.1 Tujuan.....	24
3.2.2 Sasaran	24
3.3 Program dan Kegiatan.....	25
BAB IV PENUTUP.....	31

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Organisasi Pemerintah Daerah (Renja OPD) adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode satu tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan. Renja OPD merupakan sebuah dokumen perencanaan resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan OPD khususnya, dan pembangunan daerah pada umumnya.

Sebagai dokumen Rencana Kerja tahunan OPD, Renja mempunyai kedudukan yang strategis dalam penyelenggaraan program dan kegiatan dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran OPD mengingat Renja merupakan dokumen yang secara substansial merupakan penerjemahan dan penjabaran dari tujuan dan program kepala badan yang ditetapkan dalam Renstra kedalam program dan kegiatan tahunan OPD.

Keterkaitan Renja OPD dengan dokumen RKPD dan Renstra OPD merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena didalam Renja OPD merupakan penjabaran dan adanya hubungan keselarasan dengan dokumen daerah yang ada di atasnya seperti RPJMD, dan Renstra OPD..

Rencana kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Poso yang selanjutnya disingkat Renja, adalah dokumen perencanaan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Poso untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan Rencana Kerja tahunan OPD.

Mengingat posisi strategis dokumen Renja dalam penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka perhatian yang besar pantas diberikan sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja sehingga dapat dihasilkan dokumen Renja yang berkualitas.

Berkualitas dalam hal ini adalah telah memenuhi kriteria sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, antara lain:

1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya.
2. Program prioritas dalam Renja harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam dokumen Renstra pada tahun berkenaan.
3. Program dan kegiatan prioritas dalam Renja harus konsisten dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang.
4. Program dan kegiatan prioritas dalam Renja harus dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome) untuk program dan indikator kinerja keluaran (output) untuk kegiatan, yang bersifat realistis dan terukur.
5. Program dan kegiatan dalam Renja harus dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

1.2 Landasan Hukum

Dasar Hukum penyusunan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Poso Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 nomor 310);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Poso Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2012 Nomor 10);
16. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Poso Nomor 7111);
17. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/795/SJ Tanggal 4 Maret 2016 Tentang Penyusunan RPJMD dan RKPD Tahun 2017;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 4 Tahun 2021 Tentang RPJMD Kabupaten Poso 2021 – 2026.

19. Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Poso Nomor 188.3 / 152.b / Bapenda Tahun 2021, Tentang Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Poso Tahun 2021 – 2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

Adapun maksud disusunnya Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Tahun 2023 yaitu untuk memenuhi amanat Pasal 143 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 yakni sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah.

Sedangkan tujuan disusunnya Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Tahun 2023, yaitu:

1. Menyediakan dokumen perencanaan tahunan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Poso Tahun 2023;
2. Menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah;
3. Terwujudnya program, kegiatan dan pagu indikatif Renja Perangkat Daerah selaras dengan Peraturan Kepala Daerah tentang RKPD dan Renja Perangkat Daerah lainnya.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Perangkat Daerah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Poso Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Dokumen Renja Daerah

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.
- 2.2. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
- 2.4. Review terhadap rancangan awal RKPD
- 2.5. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN 2022

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2022 dan Capaian Renstra OPD

2.1.1 Evaluasi Renja 2022

Untuk menganalisis ataupun menilai keberhasilan dan kegagalan suatu unit kerja organisasi dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang menjadi tanggung jawabnya, tentu ada tolok ukur atau parameter penilaian yang dalam bahasa akuntabilitas disebut indikator kinerja, yang dapat menggambarkan hasil atau pencapaian hasil secara kuantitatif.

Kelompok indikator kinerja tersebut berupa indikator-indikator masukan (*input*), keluaran (*output*), hasil (*outcome*) dan dampak (*impact*). Oleh karena itu setiap indikator mempunyai karakteristik yang terkait pada tujuan program dan menggambarkan pencapaian hasil, dibatasi pada hal-hal yang vital dan penting bagi pengambilan keputusan, diutamakan pada hal-hal yang perlu mendapat prioritas dan berorientasi pada sistem pertanggungjawaban yang memperlihatkan hasil dari kegiatan.

Rencana strategis yang telah disusun perlu diukur terhadap program dan kegiatan yang telah dilaksanakan sehingga dituangkan dalam bentuk satuan yang bisa diukur untuk mengetahui sejauh mana keberhasilannya.

Pengukuran tersebut dapat dilaksanakan secara berjenjang yang dijabarkan dalam sasaran tahunan yang telah dilaksanakan sesuai dengan rencana.

Pencapaian target kinerja sasaran program dan kegiatan diukur dengan membandingkan realisasi dan perencanaan sasaran yang ingin dicapai pada waktu yang telah ditentukan. Rasio perbandingan dipergunakan untuk menentukan tingkat signifikansi capaian kinerja program dan kegiatan yang menunjukkan rasio efektivitas pelaksanaan program kegiatan terhadap anggaran yang telah ditetapkan.

Dalam Pelaksanaan Rencana Kerja Bapenda Kabupaten Poso tahun 2022 terdiri dari 2 Program dan 8 Kegiatan, 35 Sub kegiatan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, terdiri dari 7 Kegiatan.
2. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah, terdiri dari 1 Kegiatan.

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2022 dan Capaian Renstra SKPD secara umum dapat dilihat berdasarkan realisasi program dan kegiatan yang dilaksanakan Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut :

Tabel 2.1
Capaian Realisasi Fisik dan Keuangan Renja 2022

NO	KODE	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN		CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN	
				5	6	6	7	7	8
1	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai SAKIP OPD	100,00	7.849,912,388	82,33%	6.135,235,552	85,90	78,16
	5.02.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya perencanaan dan evaluasi OPD	100,00 %	62.995,332	100,00 %	56.101,260	100,00	89,06
	5.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang diselesaikan	3 Dok	47.245.532	3 Dok	46.351,460	100,00	98,11
	5.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen LKIP yang berhasil disusun	1 Dok	15.749,800	1 Dok	9.749,800	100,00	61,90
	5.02.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhinya kebutuhan gaji ASN dan Pelaporan Keuangan OPD	100,00 %	6.092,777,775	100,00 %	4.597,428,822	100,00	75,46
	5.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya kebutuhan Gaji dan Tunjangan ASN	1 Tahun	6.084,084,401	1 Tahun	4.588,736,972	100,00	75,42
	5.02.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun tepat waktu	1 Dok	8.693.374	1 Dok	8.691,850	100,00	99,98
	5.02.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terpenuhinya kebutuhan SDM yang berkompeten	65,00 %	64.945,220	33,3 %	16.606,000	33,33	25,57
		<i>Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi</i>	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Kepemimpinan	3 Org	22.125,000	0	0	0,00	0,00

5.02.01.2.12	<i>Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan</i>	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi	85 Org	25.487.220	0	0	0,00	0,00
5.02.01.2.05.11	<i>Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan</i>	Jumlah ASN yang mengikuti BIMTEK	3 org	17.333,000	1 org	16.606,000	33,33	95,81
5.02.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	100,00 %	572.679,832	82,00 %	531.116,350	82,00	92,74
5.02.01.2.06.01	<i>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</i>	Jumlah komponen instalasi listrik yang diadakan	9 Item	9.740.000	9 Item	9.686,000	100,00	99,44
5.02.01.2.06.04	<i>Penyediaan Bahan Logistik Kantor</i>	Jumlah alat dan bahan kebersihan yang di adakan	17 Item	6.490.250	17 Item	6.473,950	100,00	99,75
5.02.01.2.06.05	<i>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</i>	Jumlah barang yang di cetak dan di gandakan	75 Item	235.422.500	56 Item	210.152,500	74,67	89,27
5.02.01.2.06.06	<i>Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan</i>	Jumlah bahan bacaan yang di adakan	8 Media	7.500.000	6 Media	5.500,000	75,00	73,33
5.02.01.2.06.08	<i>Fasilitas Kunjungan Tamu</i>	Jumlah makanan dan minuman tamu yang di sediakan	35 OK	4.995.000	30 OK	4.933,700	85,71	98,77
5.02.01.2.06.09	<i>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	Jumlah perjalanan dalam daerah Yang di Laksanakan	30 OK	308.532,000	29 OK	294.370,200	96,72	95,41
		Jumlah perjalanan luar daerah Yang di Laksanakan	31 OK		30 OK			
5.02.01.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100 %	64.559,000	100,00 %	64,559.000	100,00	100,00
5.02.01.2.07.10	<i>Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</i>	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan	6 Unit	64.559,000	6 Unit	64.559,000	100,00	100,00
5.02.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya kebutuhan penunjang administrasi perkantoran	100,00 %	794.284.516	86,00 %	675.531,644	86,00	85,05
5.02.01.2.08.01	<i>Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	Jumlah materai yang diadakan	250 lbr	2.250.000	250 lbr	1.650,000	100,00	73,33

	5.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening yang dibayarkan	48 Rek	140.867.564	48 Rek	109.669,939	100,00	77,85
	5.02.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	20 Unit	53.150.000	20 Unit	52.999,000	100,00	99,72
	5.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan umum dan pengelola keuangan	100%	598.016.952	46 org	511.212,705	46,00	85,48
	5.02.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	75,00 %	197.670,713	75,00 %	193.892,476	100,00	98,09
	5.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas/Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang dipelihara	8 Unit	95.148.713	7 Unit 16 Unit	93.579,986	87,50	98,35
			Jumlah kendaraan dinas Jabatan yang memiliki STNK aktif	23 Unit					
	5.02.04.2.01.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan yang dipelihara	23 Unit	6.250.000	16 Unit	4.143,490	69,57	66,30
	5.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor/Bangunan Lainnya	Jumlah peralatan dan perlengkapan Gedung Kantor yang dipelihara	1 Unit	96.272,000	1 Unit	96.169,000	100,00	99,89
2	5.02.04	ROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Rasio Pajak Daerah terhadap Total PAD	16,30 %	1.908,175,724	16,99 %	1.720,170,950	106,86	90,15
			Persentase realisasi penerimaan pajak daerah	78,27 %		62,90 %		82,47	
	5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Meningkatnya realisasi penerimaan Pajak Daerah	78,27 %	1.908,175,724	2,00 %	1.720,170,950	100,83	90,15
	5.02.04.2.01.01	Perencanaan pengelolaan Pajak Daerah	Dokumen perencanaan pajak daerah yang disusun	2 Dok	66.500.000	2 Dok	57.004,000	100,00	85,72
	5.02.04.2.01.02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Jumlah kebijakan Pengelolaan Pajak Daerah yang disusun	1 Dok	226.094,162	1 Dok	205.542,662	100,00	90,91

5.02.04.2.01.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah WP yang menyelesaikan kewajiban tepat waktu	350 Org	111.877.500	350 Org	91.378,500	100,00	81,68	
5.02.04.2.01.04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah sarpras pengelolaan pajak daerah yang diadakan	20 Unit	145.644.000	5 Unit	109.644,000	25,00	75,28	
5.02.04.2.01.05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah peta blok data objek pajak yang tersusun	2 Kel	316.227,000	5 Kel	285.220,000	250,00	90,19	
5.02.04.2.01.06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah aplikasi pengelolaan pajak daerah yang diadakan	1 Aplikasi	117.004.780	1 Aplikasi	116.956,780	100,00	99,96	
5.02.04.2.01.07	<i>Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)</i>	<i>Jumlah objek PBB P2 dan BPHTB yang di nilai dan di tetapkan</i>	111.000 OP	256.607,500	111.000 OP	253.474,500	100,00	98,78	
5.02.04.2.01.08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Wajib Pajak yang dilayani	360 WP	81.362.500	360 WP	78.804,500	100,00	96,86	
5.02.04.2.01.09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Peserta Yang Mengikuti Bimtek (orang)	79,00 %	8.836.750	76,02 %	2.950,000	96,23	33,38	
5.02.04.2.01.10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah dokumen pelaporan pajak daerah yg tersusun	1 Dok	186.402.534	1 Dok	158.520,534	100,00	85,04	
5.02.04.2.01.11	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah pajak daerah yang berhasil ditagih	78,27 %	151.984.500	62,9 %	142.319,500	80,36	93,64	
5.02.04.2.01.12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah keberatan pajak yang diselesaikan	10 kasus	48.648.000	10 kasus	40.658,000	100,00	83,58	
5.02.04.2.01.13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah tunggakan/ piutang pajak yang berhasil diselesaikan	5,00 %	101.923.000	3,00 %	92.591,000	60,00	90,84	
5.02.04.2.01.14	<i>Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah</i>	Laporan penerimaan retribusi daerah	1 Dok	89.063.498	1 Dok	85.106,974	100,00	95,56	
Jumlah						9.758,088,112	7.855,406,502	93,37	80,50

Berdasarkan data pada tabel tersebut di atas, diperoleh informasi sebagai berikut :

1. Pada tahun 2022 penetapan Renja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Poso sebesar Rp. 9.758,088,112- yang terdiri dari 2 program dan 8 kegiatan.
2. Realisasi belanja Pada Program Penunjang Urusan Pemerintah Renja sampai dengan bulan Desember 2022 sebesar Rp. 6.135,235,552 atau terealisasi sebesar 78,16 %, dan Untuk sementara rata-rata realisasi kinerja program sebesar 88,22 %.
3. Capaian kinerja program teknis Bapenda yakni Program Pengelolaan Pendapatan Daerah dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 1.720,170,950,- atau sebesar 90.15% dari penetapan sebesar Rp. 1.908,175,724,-
4. Adapun realisasi kinerja Program Pengelolaan Pendapatan Daerah dengan indikator *Rasio Pajak Daerah Terhadap Total PAD*, dari target 16,30% berdasarkan realisasi pendapatan sampai dengan bulan desember 2022 dapat dicapai sebesar 16,99%, Sementara indikator *Persentase realisasi Pajak Daerah* target 78,27 % sampai dengan bulan Desember 2022 dapat dicapai sebesar 62,90%.

Program	Satuan	Indikator Kinerja	Target 2022	Capaian 2022
Program pengelolaan pendapatan daerah	%	Rasio Pajak Daerah terhadap Total PAD	16,30	16,99
	%	Persentase realisasi Penerimaan pajak daerah	78,27	62,90

1. Persentase PAD terhadap total pendapatan daerah

Sampai dengan Desember 2022, diketahui realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tercatat sebesar Rp.134.748,164,454,06 dan realisasi penerimaan pendapatan daerah sampai dengan Desember 2022 tercatat sebesar Rp. 1.315,101,745,622,81

$$\begin{aligned}
 \text{Persentase PAD terhadap total pendapatan daerah} &= \frac{\text{Total Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\% \\
 &= \frac{134.748,164,454,06}{1.315,101,745,622,81} \times 100 \\
 &= 10,25 \%
 \end{aligned}$$

2. Persentase potensi PAD yang dapat digali

Potensi diasumsikan adalah sama dengan target pendapatan yang telah ditetapkan, sehingga 100% potensi adalah sama dengan 100% nilai target pendapatan yang telah ditetapkan.

Sampai dengan Desember 2022, diketahui realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tercatat sebesar Rp. 134. 748,164,454,06 atau 109,14% dari target penerimaan sebesar Rp.123.462,882,675,00

2.1.2 Capaian Renstra 2022

Tingkat capaian Indikator Kinerja Utama Badan Pendapatan Tahun 2022, berdasarkan hasil pengukuran kinerja dapat diuraikan sebagai berikut :

Sasaran	Indikator Sasaran	Formulasi Pengukuran Kinerja Sasaran	Sat	Target 2022	Capaian 2022
Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Persentase Realisasi PAD terhadap Potensi PAD	Total Realisasi PAD dibagi dengan Potensi/ Target PAD dikali 100%	%	100	109,10%
	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	(Realisasi/Target)-1*100	%	0,12	0.011%

1. Persentase Pertumbuhan PAD

Sampai dengan Tanggal 31 Desember 2022 Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tercatat sebesar Rp. 134. 748,164,454,06 dan realisasi penerimaan PAD pada tahun 2021 Rp.111.719,919,275,07 Sehingga Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2022, dapat diuraikan sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Pertumbuhan PAD 2022} &= \frac{\text{Realisasi 2022} - \text{Realisasi 2021}}{\text{Realisasi 2021}} \times 100\% \\ &= \frac{134.748,164,454,06 - 111.719,919,275,07}{111.719,919,275,07} \times 100\% \\ &= 20,61\% \end{aligned}$$

2. Persentase Pertumbuhan Pajak Daerah

Sampai dengan Tanggal 31 Desember 2022 Realisasi Penerimaan Pajak Daerah tercatat sebesar Rp.22.893,655,884,12 dan realisasi penerimaan Pajak Daerah pada Tahun 2021 sebesar Rp.19.343,743,985,48. Sehingga Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2022, dapat diuraikan sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Pertumbuhan} & \\ \text{Pajak Daerah} & \\ \text{2022} & \\ & = \frac{\text{Realisasi 2022} - \text{Realisasi 2021}}{\text{Realisasi 2021}} \quad \times 100\% \\ & = \frac{22.893,655,884,12 - 19.343,743,985,48}{19.343,743,985,48} \quad \times 100\% \\ & = 18,35\% \end{aligned}$$

2.1.3 Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Badan Pendapatan Kabupaten Poso berdasarkan Tugas dan Fungsi yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Poso, prinsipnya mempunyai tugas dan fungsi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dapat ditingkatkan salah satunya dengan meningkatkan Pelayanan pada masyarakat sehingga menumbuhkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat untuk membayar pajak.

Adapun pajak daerah yang dikelola Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Poso terdiri dari :

- 1) Pajak Hotel
- 2) Pajak Restoran
- 3) Pajak Hiburan
- 4) Pajak Reklame
- 5) Pajak Penerangan Jalan
- 6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
- 7) Pajak Parkir
- 8) Pajak Air Tanah
- 9) Pajak Sarang Burung Walet
- 10) BPHTB
- 11) Pajak Bumi dan Bangunan

2.1.4 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Badan Pendapatan Daerah kabupaten poso mempunyai tugas memimpin, melakukan pembinaan teknis operasional, mengkoordinasikan, mengendalikan, melakukan pengawasan dan evaluasi dalam penyelenggaraan tugas Pengelolaan Pendapatan Daerah.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Badan Pendapatan Kabupaten Poso masih menemukan hambatan-hambatan yang mempengaruhi optimalisasi pencapaian tujuan dan sasaran kinerja, berikut hambatan-hambatan yang dimaksud:

- 1) Untuk ruangan pelayanan pajak Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Poso sudah layak untuk di manfaatkan dalam pelayanan, namun secara umum untuk keseluruhan pelayanan belum maksimal.
- 2) Masih kurangnya sarana transportasi dan sarana komputer yang memenuhi spesifikasi bila dibandingkan dengan volume kegiatan yang harus diselesaikan dengan tepat waktu.
- 3) Sumber daya kompetensi yang ada saat ini belum sebanding dengan tugas dan layanan yang di butuhkan sesuai standar.
- 4) Tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar pajak masih rendah hal ini dapat dilihat dari persentase pembayaran pajak menumpuk di akhir tahun.

2.2 Review Terhadap Rancangan Awal OPD

Pada penyusunan rancangan awal rencana kerja, Badan Pendapatan Kabupaten Poso mengusulkan 2 (dua) program dan 8 (delapan) kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2023 dengan pagu indikatif sebesar Rp 9.285,334,616-, Usulan program dan kegiatan pada ranwal Renja ini mengalami perubahan sampai dengan penetapan Renja 2023. Berikut rancangan awal renja Badan Pendapatan Kabupaten Poso Tahun 2023.

2.2

Rancangan Awal Renja 2023

NO	KODE	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN	
1	2	3	4	5	6	
1	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP OPD		100,00	7,910,679,371
	5.02.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya perencanaan dan evaluasi OPD	Bapenda	100,00	57.735,353,00
	5.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang diselesaikan	Bapenda	2 Dokumen	47.642,648,00
	5.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen LKIP yang berhasil disusun	Bapenda	1 Dokumen	10.092,705,00
	5.02.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhinya kebutuhan gaji ASN dan Pelaporan Keuangan OPD	Bapenda	1 Tahun	6.024,605,039,00
	5.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya kebutuhan Gaji dan Tunjangan ASN	Bapenda	1 Tahun	6.016,280,915,00
	5.02.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun tepat waktu	Bapenda	1 Dokumen	8.324,124,00
	5.02.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terpenuhinya kebutuhan SDM yang berkompeten	Bapenda	1 Dokumen	88.457,580,00
		<i>Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi</i>	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Kepemimpinan	Bapenda	3 Orang	62.297,000,00
		<i>Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan</i>	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi	Bapenda	85 Orang	12.249,580,00
	5.02.01.2.05.11	<i>Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan</i>	Jumlah ASN yang mengikuti BIMTEK	Bapenda	5	13.911,000,00
	5.02.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	Bapenda	100 %	657.990,109,00
	5.02.01.2.06.01	<i>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</i>	Jumlah komponen instalasi listrik yang diadakan	Bapenda	6 Item	9.209,340,00
	5.02.01.2.06.04	<i>Penyediaan Bahan Logistik Kantor</i>	Jumlah alat dan bahan kebersihan yang di adakan	Bapenda	15 Item	7.515,269,00
	5.02.01.2.06.05	<i>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</i>	Jumlah barang yang di cetak dan di gandakan	Bapenda	72 Jenis	306.814,500,00

	5.02.01.2.06.06	<i>Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan</i>	Jumlah bahan bacaan yang di adakan	Bapenda	8 Media	5.850.000,00
	5.02.01.2.06.08	<i>Fasilitas Kunjungan Tamu</i>	Jumlah makanan dan minuman tamu yang di sediakan	Bapenda	30 OK	6.705,000,00
	5.02.01.2.06.09	<i>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	Jumlah perjalanan dalam daerah yang dilaksanakan	Bapenda	31 OK	321.896,000,00
			Jumlah perjalanan luar daerah yang dilaksanakan	Bapenda	28 OK	
	5.02.01.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	Bapenda	100%	176,401,500,00
	5.02.01.2.07.10	<i>Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</i>	Jumlah sarpras gedung kantor yang diadakan	Bapenda	7 Unit	176,401,500,00
	5.02.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya kebutuhan penunjang administrasi perkantoran	Bapenda	100%	762,353,440,00
	5.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai yang diadakan	Bapenda	196 lembar	4.746,000,00
	5.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening yang dibayarkan	Bapenda	36 rekening	140.866,200,00
	5.02.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	Bapenda	33 Unit	47.200.000,00
	5.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan umum dan pengelola keuangan	Bapenda	100%	569.541,240,00
	5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	Bapenda		143.136,350,00
	5.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas/Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang dipelihara	Bapenda	8 unit	95.141,350,00
			Jumlah kendaraan dinas Jabatan yang memiliki STNK aktif	Bapenda	23 Unit	
	5.02.04.2.01.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan yang dipelihara	Bapenda	18 Unit	6.250.000,00
	5.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor/ Bangunan Lainnya	Jumlah peralatan dan perlengkapan Gedung Kantor yang dipelihara	Bapenda	1 Unit	41.745,000,00
2	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Rasio Pajak Daerah terhadap Total PAD	Bapenda	16,70%	1.374,655,245,00
			Persentase realisasi penerimaan pajak daerah	Bapenda	79,77%	
	5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Meningkatnya realisasi penerimaan Pajak Daerah	Bapenda	1,5%	1.374,655,245,00
	5.02.04.2.01.01	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Dokumen perencanaan pajak daerah yang disusun	Bapenda	2 Dok	72.930,000,00
	5.02.04.2.01.02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Jumlah kebijakan Pengelolaan Pajak Daerah yang disusun	Bapenda	1 Dok	142.018,507,00

5.02.04.2.01.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah WP yang menyelesaikan kewajiban tepat waktu	Bapenda	342 Orang	94,915,560,00
5.02.04.2.01.04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah sarpras pengelolaan pajak daerah yang diadakan	Bapenda	16 Unit	7.265,000,00
5.02.04.2.01.05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah peta blok data objek pajak yang tersusun	Bapenda	2 Kel	257.544,200,00
5.02.04.2.01.06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah aplikasi pengelolaan pajak daerah yang diadakan	Bapenda	1 Apl	83.607,579,00
5.02.04.2.01.07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah objek PBB P2 dan BPHTB yang di nilai dan di tetapkan	Bapenda	110.000 OP	134.317,680,00
5.02.04.2.01.08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Wajib Pajak Yang Dilayani	Bapenda	350 WP	73.242,500,00
5.02.04.2.01.09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Peserta Yang mengikuti Bimtek (Orang)	Bapenda	76,62%	6.068,080,00
5.02.04.2.01.10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah dokumen pelaporan pajak daerah yg tersusun	Bapenda	1 Dokumen	163.367,284,00
5.02.04.2.01.11	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah pajak daerah yang berhasil ditagih	Bapenda	76,77%	143,694,000,00
5.02.04.2.01.12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah keberatan pajak yang diselesaikan	Bapenda	10 Kasus	39.185,200,00
5.02.04.2.01.13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah tunggakan/ piutang pajak yang berhasil diselesaikan	Bapenda	5%	84.497,880,00
5.02.04.2.01.14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan penerimaan retribusi daerah	Bapenda	1 Dokumen	72.001,775,00
TOTAL					9.285,334,616

Tabel 2.3
Rancangan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2023

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KET
4	Pendapatan Daerah	36.690,000,000,00	
4.1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	36.690,000,000,00	
4.1.01	Pajak Daerah	36.640,000,000,00	
4.1.01.06	Pajak hotel	1.500,000,000,00	
4.1.01.07	Pajak Restoran	3.000,000,000,00	
4.1.01.08	Pajak Hiburan	150.000,000,00	
4.1.01.09	Pajak Reklame	1.525,000,000,00	
4.1.01.10	Pajak Penerangan Jalan	7.500,000,000,00	
4.1.01.11	Pajak Parkir	265.000,000,00	
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	150.000,000,00	
4.1.01.13	Pajak Sarang Burung Walet	250.000,000,00	
4.1.01.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	3.800,000,000,00	
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)	16.800,000,000,00	
4.1.01.16	Bea Perolehan hak Atas Tanah dan Bangunan	1.700,000,000,00	
4.1.04	Lain-lain PAD Yang sah	50.000.000,00	
4.1.04.12	Pendapatan Denda Pajak Daerah	50.000,000,00	
4.1.04.12.06	Pendapatan Denda Pajak hotel	10.000,000,00	
4.1.04.12.07	Pendapatan Denda Pajak Restoran	15.000,000,00	
4.1.04.12.08	Pendapatan Denda Pajak Hiburan	1.500,000,00	
4.1.04.12.09	Pendapatan Denda Pajak Reklame	1.000.000,00	
4.1.04.12.14	Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	10.000,000,00	
4.1.04.12.15	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)	12.500,000,00	

2.2.1 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Adapun usulan program dan kegiatan masyarakat yang disampaikan kepada pemerintah daerah terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Poso, yang dikemukakan pada kegiatan musrenbang tingkat kecamatan, secara umum berkaitan dengan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB P-2) baik itu berkaitan dengan pendataan obyek pajak baru, pemutakhiran data maupun penagihan PBB P-2. Selain itu juga terdapat usulan pelaksanaan sosialisasi tentang pajak daerah di seluruh wilayah kecamatan dengan peserta berasal dari masyarakat, aparat kelurahan/desa.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Tahun 2023 merupakan tahun kedua Periode Renstra Kementerian Keuangan yaitu: Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkeadilan guna mendukung Visi Misi Presiden, berkaitan dengan uraian diatas Bapenda Poso, mendukung salah satu kebijakannya, Menerapkan kebijakan fiskal yang responsive dan berkelanjutan, guna mencapai tingkat pendapatan Negara yang tinggi melalui pelayanan Prima.

Sedangkan yang berkaitan dengan kebijakan Renstra Dispenda Propinsi Sulawesi Tengah dengan mendukung adanya penyelenggaraan pengelolaan Pendapatan daerah yang terencana, terarah, terkoordinasi dan terkendali serta akuntabel guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Dengan demikian diharapkan Kapasitas keuangan Kabupaten Poso mampu membiayai meningkatkan kemandirian dalam pengelolaan Keuangan Daerah,

Dalam upaya mencapai tujuan tidak luput dari berbagai permasalahan yang timbul dalam penerapan sistem penganggaran berbasis kinerja adalah sulitnya merumuskan indikator kinerja sebagai alat pendeteksi tercapainya output dan outcome yang dikehendaki. Selain itu, diperlukan masa transisi untuk mengubah sistem accrual based budget yang telah dilaksanakan selama orde baru mejadi sistem penganggaran berbasis kinerja.

Selanjutnya, tantangan dalam implementasi kerangka pengeluaran jangka menengah, diantaranya adalah sulitnya menentukan pengeluaran (belanja negara) dalam perspektif jangka menengah, dengan mempertimbangkan resiko dan implikasi biaya yang berpotensi terjadi pada tahun tahun berikutnya.

Selanjutnya guna mendukung kelancaran dalam pengelolaan Anggaran untuk dapat di jadikan Pedoman di susunlah Dokumen Rancangan Awal RKPD Badan Pendapatan Daerah mengacu pada Rancangan RPJMD tahun 2021-2026, dimana dokumen tersebut memuat visi dan misi Pemerintah kabupaten yang wajib dipedomani dalam penyusunan Renja OPD.

Adapun visi Pembangunan daerah Kabupaten Poso tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

“ Poso Menjadi Kabupaten, Maju,Tangguh, dan Terdepan di Sulawesi Tengah”

Dalam mewujudkan visi pembangunan jangka menengah, maka ditetapkan beberapa misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Poso Tahun 2021-2026, yaitu:

- 1) Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Alam Unggulan Daerah Berbasis Kawasan Melalui Tata Kelola Desa Yang Akuntabel, Transparan, Inovatif, Produktif Menuju Desa Maju..
- 2) Mewujudkan kualitas kesehatan masyarakat menuju poso sehat..
- 3) Mewujudkan Pendidikan Yang Terjangkau, Berkualitas Dan Inklusif Menuju Poso Pintar..
- 4) Mewujudkan perekonomian masyarakat dan daerah yang sejahtera dan berdaya saing melalui pengembangan potensi sumberdaya local.
- 5) Mewujudkan pemerintahan yang responsif, profesional, transparan, melayani, bekerja tuntas, inovatif, dan akuntabel.
- 6) Mewujudkan kehidupan masyarakat Poso yang Harmoni dan Tangguh Bencana, sadar akan Lingkungan Berkelanjutan, toleran, dan damai.

- 7) Mewujudkan Kota Poso sebagai Kota Transit yang ramah, indah dan nyaman dengan Infrastruktur yang Terdepan dan merata di seluruh wilayah.

3.2.1 Tujuan dan Sasaran Renja OPD

3.2.1 Tujuan

Dalam upaya mewujudkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Poso, maka Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah yang akan dicapai oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Poso seperti yang tertuang dalam Renstra adalah sebagai berikut :

Tujuan	Indikator Tujuan
Mewujudkan kemandirian keuangan daerah	Rasio PAD terhadap Total Pendapatan

3.2.2 Sasaran

Sasaran merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai dan rasional untuk dicapai dalam suatu kurun waktu tertentu.

Berdasarkan uraian pengertian tersebut maka Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Poso menetapkan sasaran perangkat daerah dalam rangka mencapai tujuan adalah sebagai berikut : **“Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)”**

Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Formulasi Pengukuran
Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Persentase Realisasi PAD terhadap Potensi PAD	Total Realisasi PAD di bagi dengan Potensi / Target PAD di Kali 100 %
	Deviasi realisasi PAD dalam APBD	Realisasi / Target)-1*100

3.3 Program dan Kegiatan

Adapun program, kegiatan, target kinerja dan usulan pagu indikatif yang akan dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Poso tahun 2023, adalah sebagai berikut :

- 1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota:
 - 1.1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - a) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - b) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihtisar Realisasi SKPD
 - 1.2 Kegiatan Administrasi Keuangan
 - a) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - 1.3 Kegiatan Administrasi Kepegawaian
 - a) Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
 - b) Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
 - c) Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
 - 1.4 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - a) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - b) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - c) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - d) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - e) Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu

- f) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

1.5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah

- a) Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

1.6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- a) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- b) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
- c) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- d) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

1.7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- a) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas
- b) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas.

2 Program Pengelolaan Pendapatan Daerah :

- a) Perencanaan pengelolaan pajak daerah
- b) Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.
- c) Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah
- d) Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah
- e) Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah
- f) Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah
- g) Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
- h) Penetapan Wajib Pajak Daerah
- i) Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah
- j) Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah

- k) Penagihan Pajak Daerah
- l) Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah
- m) Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah
- n) Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah

Berikut penetapan rencana kerja Badan Pendapatan Kabupaten Poso Tahun 2023

Tabel 3.1
Penetapan Renja 2023

NO	KODE	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN	
					5	6
1	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP OPD		100,00	7.791,336,145
	5.02.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya perencanaan dan evaluasi OPD	Bapenda	100,00%	48.197,696
	5.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang diselesaikan	Bapenda	3 Dok	38.528,871
	5.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen LKIP yang berhasil disusun	Bapenda	1 Dok	9.668,825
	5.02.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhinya kebutuhan gaji ASN dan Pelaporan Keuangan OPD	Bapenda	100,00%	6.175,946,170
	5.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya kebutuhan Gaji dan Tunjangan ASN	Bapenda	1 Tahun	6.167,622,546
	5.02.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun tepat waktu	Bapenda	1 Dok	8.323,624
	5.02.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terpenuhinya kebutuhan SDM yang berkompeten	Bapenda	8 org	70.734,580,00
		<i>Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi</i>	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Kepemimpinan	Bapenda	3 Org	50,203,000,00
		<i>Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan</i>	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi	Bapenda	85 Org	11.060,580,00
	5.02.01.2.05.11	<i>Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan</i>	Jumlah ASN yang mengikuti BIMTEK	Bapenda	3 org	9.471,000,00

5.02.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	Bapenda	100,00%	482.916,409,00
5.02.01.2.06.01	<i>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</i>	Jumlah komponen instalasi listrik yang diadakan	Bapenda	9 Item	9.209,340,00
5.02.01.2.06.04	<i>Penyediaan Bahan Logistik Kantor</i>	Jumlah alat dan bahan kebersihan yang di adakan	Bapenda	17 Item	7.483,769,00
5.02.01.2.06.05	<i>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</i>	Jumlah barang yang di cetak dan di gandakan	Bapenda	75 Item	235.169,300,00
5.02.01.2.06.06	<i>Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan</i>	Jumlah bahan bacaan yang di adakan	Bapenda	8 Media	5.850,000,00
5.02.01.2.06.08	<i>Fasilitasi Kunjungan Tamu</i>	Jumlah makanan dan minuman tamu yang di sediakan	Bapenda	35 OK	5.625,000,00
5.02.01.2.06.09	<i>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	Jumlah perjalanan dalam daerah yang dilaksanakan	Bapenda	30 OK	219.579,000,00
		Jumlah perjalanan luar daerah yang dilaksanakan	Bapenda	31 OK	
5.02.01.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	Bapenda	100,00%	155.651,500,00
5.02.01.2.07.10	<i>Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</i>	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan	Bapenda	6 Unit	155.651,500,00
5.02.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya kebutuhan penunjang administrasi perkantoran	Bapenda	100,00%	739.903,440,00
5.02.01.2.08.01	<i>Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	Jumlah materai yang diadakan	Bapenda	250 lbr	4.746,000,00
5.02.01.2.08.02	<i>Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik</i>	Jumlah rekening yang dibayarkan	Bapenda	48 Rek	140.866,200,00
5.02.01.2.08.03	<i>Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	Bapenda	20 Unit	24.750,000,00
5.02.01.2.08.04	<i>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>	Jumlah jasa pelayanan umum dan pengelola keuangan	Bapenda	100%	569.541,240,00
5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	Bapenda	75,00 %	117.986,350,00
5.02.01.2.09.01	<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas/Kendaraan Dinas Jabatan</i>	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang dipelihara	Bapenda	8 Unit 23 Unit	88.141,350,00
		Jumlah kendaraan dinas Jabatan yang memiliki STNK aktif	Bapenda	23 Unit	
5.02.01.2.09.02	<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan</i>	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan yang dipelihara	Bapenda	23 Unit	6.250,000,00

	5.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor/Bangunan Lainnya	Jumlah peralatan dan perlengkapan Gedung Kantor yang dipelihara	Bapenda	1 Unit	23.595,000,00
2	5.02.04	ROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Rasio Pajak Daerah terhadap Total PAD	Bapenda	16,70 %	993.952,478,00
			Persentase realisasi penerimaan pajak daerah	Bapenda	79,77 %	
	5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Meningkatnya realisasi penerimaan Pajak Daerah	Bapenda		993.952,478,00
	5.02.04.2.01.01	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Dokumen perencanaan pajak daerah yang disusun	Bapenda	2 Dok	37.233,500,00
	5.02.04.2.01.02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Jumlah kebijakan Pengelolaan Pajak Daerah yang disusun	Bapenda	1 Dok	106.649,075,00
	5.02.04.2.01.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah WP yang menyelesaikan kewajiban tepat waktu	Bapenda	350 Org	66.506,100,00
	5.02.04.2.01.04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah sarpras pengelolaan pajak daerah yang diadakan	Bapenda	20 Unit	6.876,750,00
	5.02.04.2.01.05	Pendaftaran dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah peta blok data objek pajak yang tersusun	Bapenda	2 Kel	212.964,300,00
	.02.04.2.01.06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah aplikasi pengelolaan pajak daerah yang diadakan	Bapenda	1 Aplikasi	49.821,722,00
	5.02.04.2.01.07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah objek PBB P2 dan BPHTB yang di nilai dan di tetapkan	Bapenda	111.000 OP	96.396,300,00
	5.02.04.2.01.08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Wajib Pajak Yang Dilayani	Bapenda	360 WP	73.311,100,00
	5.02.04.2.01.09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Peserta Yang mengikuti Bimtek (Orang)	Bapenda	79,00%	5.132,000,00
	5.02.04.2.01.10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah dokumen pelaporan pajak daerah yg tersusun	Bapenda	1 Dok	106.245,156,00
	5.02.04.2.01.11	<i>Penagihan Pajak Daerah</i>	Jumlah pajak daerah yang berhasil ditagih	Bapenda	78,27%	106.019,000,00
	5.02.04.2.01.12	<i>Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah</i>	Jumlah keberatan pajak yang diselesaikan	Bapenda	10 kasus	28.310,000,00
	5.02.04.2.01.13	<i>Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah</i>	Jumlah tunggakan/ piutang pajak yang berhasil diselesaikan	Bapenda	5 %	56.173,500,00
	5.02.04.2.01.14	<i>Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah</i>	Laporan penerimaan retribusi daerah	Bapenda	1 Dok	42.313,975,00
TOTAL						8.785,288,623,00

Tabel 3.2

Penetapan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2023

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KET
4	Pendapatan Daerah	38.690,000,000,00	
4.1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	38.690,000,000,00	
4.1.01	Pajak Daerah	38.640,000,000,00	
4.1.01.06	Pajak hotel	1.500,000,000,00	
4.1.01.07	Pajak Restoran	3.000,000,000,00	
4.1.01.08	Pajak Hiburan	200.000,000,00	
4.1.01.09	Pajak Reklame	1.525,000,000,00	
4.1.01.10	Pajak Penerangan Jalan	9.000,000,000,00	
4.1.01.11	Pajak Parkir	265.000,000,00	
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	150.000,000,00	
4.1.01.13	Pajak Sarang Burung Walet	250.000,000,00	
4.1.01.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	3.800,000,000,00	
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)	17.250,000,000,00	
4.1.01.16	Bea Perolehan hak Atas Tanah dan Bangunan	1.700,000,000,00	
4.1.04	Lain-lain PAD Yang sah	50.000.000,00	
4.1.04.12	Pendapatan Denda Pajak Daerah	50.000,000,00	
4.1.04.12.06	Pendapatan Denda Pajak hotel	10.000,000,00	
4.1.04.12.07	Pendapatan Denda Pajak Restoran	15.000,000,00	
4.1.04.12.08	Pendapatan Denda Pajak Hiburan	1.500,000,00	
4.1.04.12.09	Pendapatan Denda Pajak Reklame	1.000.000,00	
4.1.04.12.14	Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	10.000,000,00	
4.1.04.12.15	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)	12.500,000,00	

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Poso tahun 2023 ini merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Poso Tahun 2021-2026 dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi Daerah Kabupaten Kabupaten Poso serta target dan sasaran pembangunan yang dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Daerah Kabupaten Poso tahun 2023.

Penyusunan rencana kinerja organisasi perangkat daerah tahun 2023 ini, dengan tujuan untuk menentukan acuan dan arah pembangunan di bidang pendapatan daerah Kabupaten Poso. Penyusunan ini tidak terlepas dari tujuan dan sasaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Poso yang telah ditetapkan.

Optimalisasi dalam pelaksanaan isi Renja merupakan hal penting yang perlu diupayakan dalam rangka mewujudkan kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan kewenangan urusan yang diemban oleh Badan Pendapatan Daerah sebagai salah satu OPD di lingkup Pemerintah Kabupaten Poso.

Semoga Renja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Poso Tahun 2023 ini dapat dijadikan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan terkait sehingga diharapkan dapat tercapai tujuan pembangunan daerah Kabupaten Poso Tahun 2023. Akhirnya, ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen ini.